

JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

Relevansi Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Menjawab Tantangan Kebangsaan Kontemporer

Al-Qadri¹, Alyana Balqis², Baiq Dea Salza Aulia³

¹Universitas mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, alqadri304@gmail.com.

²Universitas mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, alianabalqis86@gmail.com.

³Universitas mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, deabaiq4@gmail.com.

Abstrak: Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga keutuhan dan identitas bangsa. Namun, di era kontemporer, Indonesia menghadapi berbagai tantangan kebangsaan yang kompleks, seperti perpecahan sosial, radikalisme, ketidakadilan ekonomi, dan pengaruh eksternal yang menguji ketahanan ideologi nasional. Artikel ini mengkaji relevansi Pancasila dalam menjawab tantangan kebangsaan kontemporer. Karena metode ini relevan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber sekunder yang membahas nilai-nilai Pancasila serta tantangan kebangsaan kontemporer secara komprehensif dan mendalam tanpa melakukan penelitian lapangan langsung. Penelitian ini menganalisis bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi solusi melalui lima prinsip dasarnya yang menekankan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Pancasila tetap relevan, implementasinya belum optimal, ditandai dengan adanya ketimpangan antara harapan dan praktik. Oleh karena itu, revitalisasi dan penguatan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan dan program kemasyarakatan yang responsif terhadap dinamika globalisasi dan perubahan sosial sangat diperlukan. Tulisan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan penerapan Pancasila sebagai landasan efektif dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan kemajuan Indonesia di era modern.

Kata Kunci: Pancasila, Dasar Negara, Tantangan, Implementasi Nilai, Relevansi Pancasila.

Abstract: Pancasila, as the foundational ideology of Indonesia, plays a strategic role in maintaining the unity and identity of the nation. However, in the contemporary era, Indonesia faces complex national challenges such as social fragmentation, radicalism, economic injustice, and external influences that test the resilience of the national ideology. This article examines the relevance of Pancasila in addressing these challenges using a literature review method, as this approach is suitable for comprehensively and deeply analyzing secondary sources related to the values of Pancasila and contemporary national issues without conducting direct field research. The study analyzes how the values of Pancasila can serve as solutions through its five core principles emphasizing divinity, humanity, unity, democracy, and social justice. The findings indicate that although Pancasila remains relevant, its implementation is not yet optimal, marked by a gap between expectations and practice. Therefore, revitalizing and strengthening the implementation of Pancasila values through education and community programs that are responsive to globalization dynamics and social change is highly necessary. This paper aims to enhance understanding and application of Pancasila as an effective foundation for maintaining Indonesia's unity, cohesion, and progress in the modern era.

Keywords: Pancasila, State Foundation, Challenge, Value Implementation, Relevance of Pancasila

*Correspondence Address: alqadri304@gmail.com

Article History	Received	Revised	Published
	31 May 2025	31 May 2025	30 November 2025

PENDAHULUAN | INTRODUCTION

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang menjadi pedoman utama dalam berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai landasan dan pengawas dalam penyelenggaraan ketatanegaraan yang meliputi aspek ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan negara. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh warga Indonesia, bahkan dalam aktivitas sehari-hari. Nilai-nilai tersebut mencerminkan jati diri bangsa Indonesia (Wahyudi & Mardani, 2024).

Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan kebangsaan kontemporer yang kompleks dan menguji ketahanan ideologi negara. Tantangan-tantangan tersebut meliputi isu-isu seperti polarisasi sosial, radikalisme, dan ketidakadilan ekonomi, yang semakin dipengaruhi oleh globalisasi dan perubahan sosial budaya. Fenomena-fenomena ini menjadi ujian penting bagi relevansi dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

Alasan peneliti mengangkat judul “Relevansi Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Menjawab Tantangan Kebangsaan Kontemporer” didasarkan pada urgensi untuk mengkaji kembali peran dan fungsi Pancasila dalam menghadapi dinamika kebangsaan saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, penting untuk memahami sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih relevan dan efektif sebagai landasan dalam mengatasi masalah kebangsaan. Selain itu, kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana implementasi nilai-nilai Pancasila telah berjalan dan kendala yang dihadapi dalam penerapannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa rumusan masalah utama yang menjadi pijakan kajian. Pertama, apa saja tantangan kebangsaan kontemporer utama yang dihadapi Indonesia saat ini? Kedua, bagaimana relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Ketiga, sejauh mana implementasi nilai-nilai Pancasila telah berjalan efektif dalam menjawab berbagai tantangan kebangsaan kontemporer? Rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas bagi penelitian sehingga hasil kajian dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan solusi yang aplikatif dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan kemajuan bangsa Indonesia.

METODE | METHOD

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel, buku, dan publikasi akademik yang membahas tentang Pancasila sebagai dasar negara serta tantangan kebangsaan kontemporer di Indonesia (Sukmadinata, 2016). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, serta menafsirkan makna dari berbagai dinamika sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang berkembang di era modern. (Creswell, 2014). (Menurut Sugiyono, 2012), penelitian kualitatif menggunakan narasi atau kata-kata untuk menjelaskan fenomena dan situasi sosial, dimana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menafsirkan data. Studi literatur ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi berbagai tantangan kebangsaan, sekaligus mengidentifikasi bagaimana penerapan dan interpretasi

Pancasila dapat disesuaikan dengan konteks kebangsaan saat ini agar tetap menjadi landasan yang kuat dalam menjaga persatuan, stabilitas, dan keadilan sosial di Indonesia.

Jadi, metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif ini sangat sesuai digunakan dalam penelitian ini karena memungkinkan peneliti untuk menggali, mengkaji, dan menganalisis data secara mendalam dari berbagai sumber terpercaya tanpa melakukan observasi lapangan langsung, sehingga memberikan dasar konseptual dan analitis yang kuat untuk menilai relevansi Pancasila dalam menjawab tantangan kebangsaan masa kini.

HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila menghadapi berbagai tantangan kebangsaan kontemporer yang kompleks dan multidimensional. Tantangan ini tidak hanya berasal dari faktor internal, seperti dinamika sosial, politik, dan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti globalisasi dan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menjadi landasan normatif yang sangat penting untuk menjaga persatuan, stabilitas, dan keadilan sosial di tengah perubahan zaman. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial memiliki potensi besar untuk menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai isu modern yang mengancam keutuhan bangsa. Namun, tantangan terbesar terletak pada bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan dan diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kajian ini berupaya menguraikan secara mendalam relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan kebangsaan kontemporer serta mengevaluasi sejauh mana implementasi nilai-nilai Pancasila telah berjalan.

Pembahasan selanjutnya akan menguraikan berbagai tantangan kebangsaan utama yang dihadapi Indonesia saat ini, kemudian menelaah relevansi nilai-nilai Pancasila sebagai solusi terhadap tantangan tersebut, dan terakhir membahas implementasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Tantangan Kebangsaan Kontemporer di Indonesia

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila menghadapi berbagai tantangan kebangsaan kontemporer yang kompleks dan multidimensional. Tantangan ini tidak hanya berasal dari faktor internal, seperti dinamika sosial, politik, dan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti globalisasi dan kemajuan teknologi. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menjadi landasan normatif yang sangat penting untuk menjaga persatuan, stabilitas, dan keadilan sosial di tengah perubahan zaman. Adapun tantangan-tantangan kebangsaan yang dihadapi oleh Indonesia yakni:

a. Tantangan Internal

1) Polarisasi Sosial

Indonesia sebagai negara yang majemuk dengan keberagaman suku, agama, ras, dan budaya menghadapi tantangan serius berupa polarisasi sosial dan politik yang semakin menguat. Polarisasi ini terlihat jelas dalam berbagai peristiwa politik, termasuk pemilihan umum, di mana masyarakat terpecah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan. Media sosial yang semula menjadi sarana komunikasi efektif kini justru menjadi medan pertempuran informasi yang sering kali tidak akurat dan penuh dengan ujaran kebencian.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putra (2023) dalam jurnal *Media and Society*, penyebaran hoaks dan disinformasi di media sosial memperparah ketegangan sosial dan memperlebar jurang perpecahan antar kelompok masyarakat. Kondisi ini tidak hanya mengancam stabilitas politik, tetapi juga mengikis rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Teori konflik sosial menjelaskan bahwa perbedaan kepentingan dan ketimpangan akses terhadap sumber daya

informasi dapat memicu konflik horizontal yang berpotensi mengancam integrasi nasional. Penanganan polarisasi ini membutuhkan penguatan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga (Persatuan Indonesia) dan sila keempat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan), yang menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan perbedaan (Sugiyarto, 2012).

2) Krisis Moral dan Maraknya Korupsi

Krisis moral menjadi salah satu tantangan besar yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Korupsi yang meluas di berbagai sektor pemerintahan dan swasta telah menjadi penyakit kronis yang menggerogoti kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Selain itu, intoleransi dan radikalisme yang semakin meningkat juga menunjukkan adanya degradasi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

Menurut teori etika politik dari Rawls, legitimasi sebuah negara sangat bergantung pada integritas dan moralitas para pemimpinnya. Ketika nilai-nilai moral ini terkikis, maka legitimasi negara dan stabilitas sosial akan terganggu. Penelitian oleh (Sari, Nugroho, 2022) dalam *Indonesian Journal of Governance* menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus diiringi dengan pendidikan karakter dan penguatan nilai-nilai Pancasila agar masyarakat memiliki kesadaran kolektif untuk menolak praktik korupsi dan intoleransi. Krisis moral ini tidak hanya berdampak pada aspek politik dan pemerintahan, tetapi juga merambah ke kehidupan sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya perilaku.

3) Ketimpangan Sosial dan Ekonomi yang Masih Mengakar.

Meskipun Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil selama beberapa dekade terakhir, ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah utama yang menghambat pembangunan berkelanjutan. Perbedaan signifikan dalam akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan kerja antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau Jawa dan luar Jawa, menciptakan jurang ketidakadilan yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya pemerataan pembangunan agar tercipta keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Wibowo (2024) dalam *Journal of Sustainable Development* menyatakan bahwa penguatan nilai gotong royong dan keadilan sosial dalam Pancasila dapat menjadi landasan untuk mengatasi ketimpangan ini. Ketimpangan yang terus dibiarkan berisiko menimbulkan rasa tidak puas dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga mengancam stabilitas nasional (Supardan, 2011).

4) Tantangan Demokrasi dan Kualitas Partisipasi Politik

Sejak era reformasi, Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan dalam proses demokrasi. Namun, kualitas demokrasi masih menghadapi berbagai tantangan. Politik uang, korupsi politik, rendahnya tingkat partisipasi politik yang substantif, serta lemahnya pendidikan politik menjadi kendala utama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan inklusif. Banyak warga negara yang hanya berpartisipasi secara simbolis, misalnya melalui media sosial, tanpa pemahaman yang mendalam tentang isu-isu politik dan kebijakan publik. Hal ini menyebabkan demokrasi menjadi kurang berkualitas dan rawan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan sempit. Teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Habermas menekankan pentingnya partisipasi aktif dan rasional warga negara dalam proses pengambilan keputusan politik. (Prasetyo, 2023) dalam *Journal of Political Science* menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang kuat dapat meningkatkan

kualitas partisipasi politik masyarakat, sehingga demokrasi Indonesia dapat berjalan dengan lebih sehat dan berkelanjutan (Situru, 2019).

5) Krisis Identitas dan Dampak Globalisasi Budaya

Globalisasi membawa arus informasi, budaya, dan nilai-nilai baru yang sangat cepat masuk ke Indonesia, terutama melalui media massa dan internet. Perubahan budaya yang cepat ini menimbulkan tantangan dalam menjaga identitas nasional dan nilai-nilai luhur bangsa. Generasi muda khususnya rentan terhadap pengaruh budaya asing yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai lokal dan nasional. Menurut teori pembangunan manusia dari Amartya Sen, identitas budaya adalah bagian penting dari pembangunan yang berkelanjutan. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai identitas nasional menjadi sangat penting untuk menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi yang masif. Lestari (2024) dalam *Cultural Studies Journal* menegaskan perlunya penguatan pendidikan nilai-nilai Pancasila di sekolah dan masyarakat sebagai upaya mempertahankan budaya nasional sekaligus membangun bangsa yang berkarakter.

6) Tantangan Teknologi Informasi dan Literasi Digital

Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi membawa dampak besar bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Di satu sisi, teknologi membuka peluang besar untuk kemajuan ekonomi dan pendidikan. Namun, di sisi lain, ketimpangan literasi digital menyebabkan sebagian masyarakat rentan terhadap penyebaran disinformasi, hoaks, dan cyberbullying. Ketimpangan akses terhadap teknologi juga memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Pendidikan literasi digital yang masih rendah membuat masyarakat sulit memilah informasi yang benar dan bertanggung jawab dalam menggunakan media digital. Buckingham (2003), dalam teorinya tentang literasi media menekankan pentingnya pendidikan yang mampu membekali masyarakat dengan kemampuan kritis terhadap informasi. Rahman dan Sari (2025), dalam *Journal of Digital Society* menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila dalam literasi digital dapat membangun kesadaran etika dan tanggung jawab sosial di dunia maya, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara positif untuk kemajuan bangsa.

7) Isu Tenaga Kerja dan Ketenagakerjaan di Era Digital

Pasar tenaga kerja Indonesia menghadapi tantangan besar akibat perubahan struktural yang dipicu oleh digitalisasi dan otomatisasi. Banyak pekerja menghadapi ketidakpastian pekerjaan, upah rendah, status kerja yang tidak jelas, dan perlindungan sosial yang belum memadai. Kondisi ini menimbulkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang berpotensi memicu konflik sosial. Menurut teori ketenagakerjaan dan perlindungan sosial, negara harus hadir memberikan jaminan dan kebijakan yang adil untuk melindungi hak-hak pekerja. Santoso (2023) dalam *Journal of Labor Studies* menekankan perlunya sinergi antara nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia), dengan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan agar kesejahteraan pekerja dapat terjamin.

b. Tantangan Eksternal

1) Ketegangan dan Rivalitas Geopolitik Global

Indonesia berada di tengah persaingan strategis antara kekuatan besar dunia, terutama Amerika Serikat dan China. Rivalitas ini terlihat jelas di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Laut China Selatan yang menjadi pusat sengketa wilayah dan militerisasi. Upaya China memperluas pengaruhnya melalui

pembangunan pulau buatan dan kehadiran militer memicu kekhawatiran negara-negara tetangga, termasuk Indonesia yang harus memperkuat postur pertahanan maritimnya, khususnya di wilayah Natuna. Ketegangan ini menuntut Indonesia untuk menjaga kebijakan luar negeri yang bebas-aktif, menjaga netralitas sekaligus memperkuat diplomasi demi menjaga stabilitas kawasan.

2) Perang Dagang dan Ketidakpastian Ekonomi Global

Perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang kembali memanas pada 2025 membawa dampak signifikan bagi ekonomi Indonesia. Kebijakan tarif tinggi dan proteksionisme menyebabkan gangguan rantai pasok global, menurunkan permintaan ekspor Indonesia, serta melemahkan harga komoditas yang menjadi sumber pendapatan nasional. Selain itu, fluktuasi nilai tukar dan inflasi global yang dipicu oleh konflik geopolitik turut menekan daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi domestik. Namun, kondisi ini juga membuka peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi asing dan memperkuat industri dalam negeri dengan strategi diversifikasi pasar dan reformasi struktural.

3) Ancaman Keamanan Non-Tradisional dan Cybersecurity

Globalisasi dan kemajuan teknologi membawa tantangan baru berupa ancaman keamanan siber, spionase industri, serta infiltrasi teknologi sensitif. Ketegangan geopolitik juga memicu perlombaan pengembangan teknologi militer dan pertahanan siber yang dapat berdampak pada keamanan nasional. Indonesia perlu memperkuat sistem pertahanan siber dan meningkatkan kapasitas intelijen untuk menghadapi ancaman ini. Selain itu, jaringan kejahatan internasional seperti perdagangan narkoba dan terorisme lintas negara juga menjadi tantangan serius bagi kedaulatan dan keamanan dalam negeri

4) Pengaruh Globalisasi Budaya dan Krisis Identitas

Arus informasi dan budaya asing yang masuk melalui media massa dan internet membawa tantangan dalam menjaga identitas nasional dan nilai-nilai luhur bangsa. Globalisasi mempercepat perubahan sosial budaya yang kadang bertentangan dengan kearifan lokal dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terutama berpengaruh pada generasi muda yang rentan terhadap pengaruh budaya asing yang dapat mengikis rasa kebangsaan dan toleransi. Oleh karena itu, penguatan pendidikan nilai-nilai Pancasila dan budaya nasional menjadi sangat penting untuk menjaga harmoni dan persatuan bangsa.

5) Dinamika Politik dan Ekonomi Global yang Tidak Stabil

Konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah turut menciptakan ketidakpastian di pasar global, mempengaruhi harga energi, pangan, dan aliran modal. Kebijakan moneter negara maju yang ketat menyebabkan pengurangan aliran modal ke negara berkembang, termasuk Indonesia, yang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Indonesia harus mampu menavigasi dinamika ini dengan kebijakan ekonomi yang adaptif dan menjaga stabilitas makroekonomi.

2. Relevansi Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Kebangsaan Kontemporer

Relevansi Pancasila di era modern merujuk pada signifikansi nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika masyarakat kontemporer. Sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila mempertahankan relevansi yang kuat hingga saat ini. Pancasila memegang peranan penting dalam memandu pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya, seperti keadilan sosial dan tanggung jawab terhadap alam serta lingkungan hidup, dapat membimbing kebijakan dan praktik pembangunan yang berkelanjutan demi menjaga kelestarian sumber daya alam. Relevansi Pancasila di era modern sangatlah krusial dalam menghadapi beragam tantangan dan dinamika sosial,

politik, serta ekonomi yang terjadi saat ini. Berikut adalah beberapa alasan yang menggarisbawahi mengapa Pancasila tetap relevan:

a. Identitas nasional

Pancasila memainkan peran sentral dalam membentuk dan memperkuat identitas nasional Indonesia. Sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila menjadi fondasi dalam menghadapi tantangan zaman, termasuk arus globalisasi yang semakin intens. Di tengah derasnya pengaruh budaya asing, modernisasi, dan integrasi global, Pancasila hadir sebagai penjaga jati diri bangsa yang majemuk. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lima sila Pancasila mencerminkan kearifan lokal dan semangat kebhinekaan. Ketuhanan Yang Maha Esa, misalnya, mengakomodasi keberagaman agama di Indonesia dan menjunjung tinggi toleransi antarumat beragama. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, sedangkan Persatuan Indonesia memperkuat rasa kebangsaan dan solidaritas di tengah pluralitas suku, budaya, dan bahasa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menanamkan semangat demokrasi dan musyawarah, sementara sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan komitmen terhadap pemerataan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam konteks globalisasi, ketika budaya luar dengan mudah masuk melalui media sosial, hiburan, dan ekonomi, Pancasila menjadi filter yang membantu masyarakat Indonesia untuk bersikap selektif. Masyarakat diajak untuk terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian, identitas nasional Indonesia tidak larut atau hilang, melainkan justru semakin kokoh dan adaptif. Pancasila juga memiliki peran strategis dalam memperkuat integrasi nasional. Ia menjadi titik temu dari berbagai perbedaan dan potensi konflik, serta memperkuat semangat gotong royong sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Melalui pendidikan, kebijakan publik, dan kehidupan sehari-hari, nilai-nilai Pancasila harus terus diinternalisasikan agar generasi muda tidak tercerabut dari akar budayanya. Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Indonesia mampu mempertahankan keunikan dan keberagaman budayanya, sekaligus membangun persatuan yang kokoh. Di era globalisasi yang terus berkembang, Pancasila tetap relevan dan menjadi kompas moral serta identitas kolektif bangsa Indonesia.

b. Pilar-pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Pancasila menyediakan landasan yang kokoh dan menyeluruh bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah dinamika zaman modern. Di era yang ditandai dengan kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, dan perubahan sosial yang cepat, nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman yang relevan dalam membangun masyarakat Indonesia yang adil, harmonis, dan berkeadilan. Nilai keadilan sosial, yang tercantum dalam sila kelima, menegaskan pentingnya pemerataan kesejahteraan dan kesempatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks saat ini, hal ini berarti menjembatani kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih terjadi antara berbagai daerah dan kelompok masyarakat, serta memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Demokrasi yang dijiwai oleh nilai musyawarah dan perwakilan sebagaimana tercermin dalam sila keempat, menjadi fondasi bagi sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif. Pancasila mengajarkan bahwa pengambilan keputusan hendaknya dilakukan melalui dialog, menghargai perbedaan pendapat, dan mengutamakan kepentingan bersama. Hal ini sangat penting dalam memperkuat demokrasi yang sehat dan mencegah polarisasi di masyarakat. Nilai musyawarah

sebagai bagian dari budaya politik Indonesia mencerminkan kearifan lokal dalam menyelesaikan persoalan secara damai dan kolektif. Di tengah meningkatnya tantangan global seperti konflik identitas, intoleransi, dan disinformasi, semangat musyawarah menjadi cara efektif dalam merawat kohesi sosial dan membangun konsensus nasional. Sementara itu, persatuan, sebagaimana terkandung dalam sila ketiga, menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan bangsa di tengah keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Di era digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan masif, Pancasila membantu masyarakat untuk tetap bersatu meskipun berbeda. Persatuan berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa menjadikan Indonesia tetap teguh menghadapi tantangan disintegrasi.

Dengan demikian, Pancasila bukan hanya warisan historis, tetapi juga panduan hidup yang dinamis. Ia tidak lekang oleh waktu, melainkan justru semakin diperlukan dalam merespons berbagai tantangan era modern. Melalui pengamalan nilai-nilainya, Indonesia dapat terus membangun tatanan sosial yang adil, damai, dan sejahtera bagi seluruh rakyatnya.

c. Kesetaraan dan Keadilan

Prinsip keadilan sosial yang tertuang dalam sila kelima Pancasila "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" memiliki relevansi yang semakin kuat di era modern yang ditandai oleh meningkatnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Globalisasi, perkembangan teknologi, serta pertumbuhan ekonomi yang tidak merata telah menciptakan jurang kesejahteraan yang semakin lebar di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, Pancasila hadir sebagai pedoman moral dan ideologis untuk mengarahkan pembangunan yang adil dan berkeadilan. Keadilan sosial menurut Pancasila bukan sekadar distribusi kekayaan secara merata, tetapi juga menyangkut terciptanya kesetaraan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan keadilan hukum. Prinsip ini mendorong negara untuk mengambil peran aktif dalam memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, etnis, atau geografis, memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan berkontribusi.

Di tengah realitas sosial saat ini, di mana sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi, prinsip keadilan sosial menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan publik yang berpihak pada rakyat. Program-program seperti bantuan sosial, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan di daerah tertinggal, dan perlindungan terhadap pekerja informal merupakan bentuk konkret dari upaya mewujudkan keadilan sosial ala Pancasila. Lebih dari itu, keadilan sosial juga mengandung makna pemberdayaan, bukan sekadar memberi bantuan. Pancasila menuntut adanya pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan yakni pembangunan yang melibatkan semua elemen masyarakat serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan keseimbangan sosial. Dengan menjadikan prinsip keadilan sosial sebagai landasan dalam penyusunan kebijakan dan tata kelola negara, Indonesia dapat memperkuat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik yang timbul akibat ketimpangan. Hal ini juga penting untuk menjaga stabilitas nasional dan memastikan bahwa setiap warga negara merasa dihargai, dilindungi, dan diberi kesempatan untuk sejahtera.

Oleh karena itu, di tengah tantangan global dan domestik, Pancasila tetap menjadi fondasi kuat dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan manusiawi. Prinsip keadilan sosial bukan hanya nilai ideal, tetapi harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

d. Harmoni dan Kerukunan Antaragama

Di tengah realitas masyarakat Indonesia yang sangat majemuk— terdiri dari berbagai agama, keyakinan, budaya, dan etnis—Pancasila hadir sebagai pilar yang menjaga harmoni sosial dan persatuan bangsa. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam sila pertama Pancasila tidak hanya menegaskan pentingnya aspek spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Prinsip ini mendorong terwujudnya sikap saling menghormati antarumat beragama dan kehidupan yang rukun di tengah keragaman.

Pancasila tidak memaksakan satu agama atau keyakinan tertentu sebagai dominan, melainkan mengakui keberadaan dan hak-hak semua agama yang diakui di Indonesia. Negara, melalui Pancasila, mengambil posisi sebagai penjamin kebebasan beragama, bukan sebagai pemihak terhadap agama tertentu. Hal ini menjadi dasar yang kuat untuk mengembangkan sikap toleransi, saling pengertian, dan kerja sama antar kelompok agama yang berbeda. Di era modern yang ditandai dengan arus informasi global dan potensi penyebaran ideologi ekstrem yang merusak, Pancasila menjadi benteng ideologis dalam menangkal intoleransi, radikalisme, dan diskriminasi berbasis agama. Penerapan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung dimensi etika dan moral yang mengajak setiap individu untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, dan solidaritas, yang merupakan inti ajaran dari semua agama.

Selain itu, Pancasila mendorong peran aktif negara dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama, seperti melalui pendidikan multikultural, dialog antaragama, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dengan demikian, kerukunan antarumat beragama tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga menjadi bagian integral dari kebijakan nasional. Melalui pengamalan sila pertama ini, Indonesia mampu menjadi contoh negara yang menjunjung tinggi toleransi beragama di tengah keberagaman. Pancasila bukan hanya mengakui pluralitas agama, tetapi juga mendorong terciptanya ruang-ruang pertemuan antarkelompok yang berbeda untuk saling belajar, bekerja sama, dan hidup berdampingan secara damai.

e. Kepemimpinan yang Berkepribadian

Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga pedoman moral dan etika dalam kepemimpinan nasional. Di era modern yang sarat dengan tantangan kompleks seperti krisis kepercayaan publik, korupsi, serta pengaruh negatif globalisasi, nilai-nilai Pancasila memberikan arah yang jelas bagi terciptanya kepemimpinan yang adil, berkepribadian, dan berintegritas. Prinsip-prinsip dalam Pancasila menanamkan nilai-nilai dasar yang penting bagi setiap pemimpin. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mendorong pemimpin untuk memiliki moralitas tinggi dan menjunjung nilai-nilai spiritual dalam pengambilan keputusan. Hal ini penting agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan setiap tindakan didasarkan pada etika serta rasa tanggung jawab kepada Tuhan dan masyarakat.

Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntut agar pemimpin memperlakukan semua rakyat secara adil, manusiawi, dan tidak diskriminatif. Ini menciptakan kepemimpinan yang mengedepankan empati, keadilan sosial, serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat kecil.

Melalui sila ketiga, Persatuan Indonesia, Pancasila menanamkan semangat kebangsaan dalam diri pemimpin. Seorang pemimpin Pancasila akan bekerja melampaui kepentingan kelompok atau golongan, dan mengedepankan integrasi nasional serta menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa.

Sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, sangat relevan dalam menumbuhkan kepemimpinan yang demokratis dan terbuka terhadap partisipasi rakyat. Pemimpin Pancasila tidak

bersifat otoriter, tetapi bijaksana, mampu mendengarkan aspirasi, dan menjunjung tinggi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan.

Sila kelima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan landasan bagi pemimpin untuk bekerja mewujudkan kesejahteraan rakyat secara merata. Kepemimpinan dalam semangat sila kelima berarti mengutamakan kepentingan umum, menghapus kesenjangan sosial, dan mengupayakan kebijakan yang berpihak pada keadilan serta pemerataan.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kepemimpinan, Indonesia dapat melahirkan sosok-sosok pemimpin yang bukan hanya cakap secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral, jujur, dan bertanggung jawab terhadap rakyat. Pemimpin seperti inilah yang dibutuhkan untuk membawa bangsa menuju kemajuan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa.

3. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Memahami nilai-nilai Pancasila bukanlah perkara sederhana, mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi bangsa saat ini. Kenyataan bahwa pemahaman nilai-nilai Pancasila terasa sulit di tengah derasnya arus global, serta mendesaknya kebutuhan akan pendidikan Pancasila sejak usia dini, mengindikasikan adanya kekurangan dalam proses internalisasi nilai-nilai luhur tersebut. Gagasan untuk menjadikan Pancasila sebagai filter terhadap pengaruh globalisasi justru mempertegas bahwa dampak negatif globalisasi akan sulit dibendung jika tidak diimbangi dengan pemahaman Pancasila yang kokoh. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila dalam menjawab tantangan kebangsaan kontemporer belum dapat dikatakan optimal. Berbagai faktor seperti arus globalisasi yang masif, modernisasi yang membawa perubahan cepat, pergeseran budaya, kuatnya pengaruh media sosial, hingga potensi terjadinya krisis nilai, menjadi penghalang signifikan bagi internalisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila secara maksimal. Berikut adalah beberapa alasan yang memperkuat pandangan ini (Adilla et al., 2024):

- a) Masih terdapat kesenjangan signifikan antara Pancasila ideal dan implementasinya di lapangan
- b) Metode pengajaran dan sosialisasi Pancasila belum sepenuhnya beradaptasi dengan era digital
- c) Tantangan kontemporer yang kompleks membutuhkan pendekatan yang lebih dinamis dan responsif
- d) Kurangnya integrasi efektif antara nilai-nilai Pancasila dengan kebijakan praktis di berbagai sektor Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. Hasil dapat disajikan dengan tabel atau grafik untuk memperjelas hasil secara verbal.

KESIMPULAN | CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menghadapi tantangan kebangsaan kontemporer yang kompleks baik dari faktor internal seperti polarisasi sosial, krisis moral, ketimpangan sosial-ekonomi, hingga tantangan demokrasi dan globalisasi budaya, maupun dari faktor eksternal berupa ketegangan geopolitik, perang dagang, ancaman keamanan siber, serta pengaruh budaya asing. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan menjadi landasan penting dalam menjaga persatuan, keadilan sosial, dan identitas nasional. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila belum optimal karena berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman, metode pendidikan yang belum adaptif, dan tantangan globalisasi yang cepat. Oleh karena itu, penguatan pendidikan, sosialisasi, dan integrasi nilai Pancasila dalam kebijakan publik sangat diperlukan. Berdasarkan dari kesimpulan di atas maka kami menyarankan beberapa langkah strategis untuk memperkuat peran Pancasila dalam menghadapi tantangan kebangsaan kontemporer.

REFERENSI | REFERENCE

- Adilla, Ananda, Dwi Amanda, Siti Rahma Sari, and Emia Sapna Marsyalina. "Relevansi Pancasila Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Dan Modernisasi Dikalangan Mahasiswa Pendidikan Biologi Angkatan 2023 UNIMED The Relevance Of Pancasila In Facing The Challenges Of Globalization And Modernization Among Biology Education Students," no. November (2024): 6484–91.
- Atar, Ardian, Alexander Nugraha Dewata, Mahib Fairuzabadi, Fitriono, and Riska Andi. "Tantangan Dan Relevansi Pancasila Bagi Generasi Milenial Dan Z." *Intelektiva* 4, no. 4 (2022): 1–5.
- Azzahra, Ammara Nabila, Maureen Airliana Rachmad, Muhammad Adnin Arrohman, and Riska Andi Fitriono. "Relevansi Pancasila Di Kalangan Remaja." *Intelektiva* 4, no. 4 (2022): 51–55.
- Dewantara, Jagad Aditya, and Afandi Afandi. "Kurangnya Rasa Nasionalisme Pada Anak: Tantangan Dan Upaya Penguatan Identitas Nasional Di Era Kontemporer Developing High Order Thinking Stimulation Model for Pre-Service Teachers' Science Education View Project." *Jurnal PPKn* 11, no. 2 (2023). <https://www.researchgate.net/publication/372958986>.
- Fathiniah, Khafifah, and Soraya Oktarina. "Implementasi Pancasila Sebagai Identitas Nasional Dalam Menghadapi Globalisasi." *The Indonesian Journal of Politics and Policy (Ijpp)* 5, no. 1 (2023): 223–33. <https://doi.org/10.35706/ijpp.v5i1.9709>.
- Hidayat, Nurul. "Narasi Kebangsaan Di Era Media Sosial: Relevansi Pancasila Dalam Ekosistem Digital Pancasila Diakui Sebagai Nilai Dasar Yang Tidak Tergantikan , Tetapi Proses Aktualisasinya" 5, no. April (2025): 105–18.
- Kurniawansyah, E. (2025). gaya hidup berkelanjutan: strategi efektif dalam penguatan profil pelajar pancasila untuk menumbuhkan karakter peduli lingkungan. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(1).
- Pancasila, Pendidikan, Pilar Kebangsaan, and Tantangan Masa Depan. "Pendidikan Pancasila Pilar Kebangsaan Dan Tantangan Masa Depan |," n.d.
- Pancasila, Relevankah, D A N Globalisasi, and Maharani Ardi Putri. "Mengungkap Hubungan Pancasila Dan" 3 (2012): 74–80.
- Ray, Swati, Joyati Das, Ranjana Pande, and A Nithya. "Swati Ray 1 , Joyati Das 2* , Ranjana Pande 3 , and A. Nithya 2" 3, no. 4 (2024): 195–222. <https://doi.org/10.1201/9781032622408-13>.
- Rudiawan. "JPK : Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan." *Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan* 4, no. 1 (2021): 65–77. <https://doi.org/10.24269/jpk.v5.n1.2020>.
- Situru, Roberto Salu. "Pancasila Dan Tantangan Masa Kini." *Elementary Journal : Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 2, no. 1 (2019): 34–41. <https://doi.org/10.47178/elementary.v2i1.611>.
- Suargana, Lisnawati, and Dinie Anggraeni Dewi. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Wawasan Kebangsaan Di Era Global." *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 74–79. <https://doi.org/10.56393/konstruksisocial.v1i9.238>.
- Sugiyarto. "TANTANGAN TERHADAP EKSISTENSI NEGARA BANGSA INDONESIA DAN PEMAKNAAN KEMBALI NASIONALISME." *Humanika* 16, no. 9 (2012).
- Supardan, Dadang. "Tantangan Nasionalisme Indonesia Dalam Era Globalisasi." *Jurnal Ilmu-Ilmu Sejarah, Budaya Dan Sosial* 2, no. 4 (2011): 37–72.
- Wahyudi, and Mardani. "Tantangan Dan Peluang Demokrasi Pancasila Di Era Digital." *Jurnal Agama Dan Lintas Budaya* 5, no. 2 (2024): 151–65.